



Research Article

Kritik Mustafa Sabri Terhadap Sekularisme Politik

Muhamad Fajar Pramono¹, Deden Ruhiat Mubarak²

1. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail: mfpramono@unida.gontor.ac.id 

2. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail: dedenruhiatmubarak56@student.afu.unida.gontor.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 27, 2024

Revised : September 10, 2024

Accepted : October 02, 2024

Available online : February 20, 2025

How to Cite: Muhamad Fajar Pramono and Deden Ruhiat Mubarak (2025) "Mustafa Sabri's Criticism of Political Secularism", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 1443-1456. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.2154..

Mustafa Sabri's Criticism of Political Secularism

Abstract. This article discusses Mustafa Sabri's critical perspective on political secularism, focusing on the dangers, nature, and consequences of the separation of religion and state. Mustafa Sabri, a prominent Muslim in the first half of the 20th century, sharply criticized the ideology of secularism, and revealed that the ideology is not only an ideological deviation, but also an evil plan to abandon religion. Mustafa Sabri identified the essence of secularism as the separation between Islamic governance and religious principles, described religion as the loss of authority over governance, and pointed out negative consequences such as the loss of morality and degradation of values. This paper provides a detailed overview of Mustafa Sabri's views on political secularism, discusses his critique of

the dangers of secularism, explains in detail the nature of the separation of religion and state, and describes the possible negative impacts for Islam. This paper is useful for those who want to understand the Islamic perspective on political secularism.

Keywords: Mustafa Sabri, Secularism, Politics

Abstrak. Artikel ini membahas perspektif kritis Mustafa Sabri terhadap sekularisme politik, dengan fokus pada bahaya, sifat, dan konsekuensi dari pemisahan agama dan negara. Mustafa Sabri, seorang Muslim terkemuka pada paruh pertama abad ke-20, dengan tajam mengkritik ideologi sekularisme, dan mengungkapkan bahwa ideologi tersebut tidak hanya merupakan penyimpangan ideologi, tetapi juga merupakan rencana jahat untuk meninggalkan agama. Mustafa Sabri mengidentifikasi esensi sekularisme sebagai pemisahan antara pemerintahan Islam dan prinsip-prinsip agama, menggambarkan agama sebagai hilangnya otoritas atas pemerintahan, dan menunjukkan konsekuensi negatif seperti hilangnya moralitas dan degradasi nilai. Kajian ini memberikan gambaran rinci tentang pandangan Mustafa Sabri tentang sekularisme politik, membahas kritiknya terhadap bahaya sekularisme, menjelaskan secara rinci hakikat pemisahan agama dan negara, serta menjelaskan dampak negatif yang mungkin terjadi bagi Islam. Tulisan ini bermanfaat bagi yang ingin memahami perspektif Islam terhadap sekularisme politik.

Kata kunci: Mustafa Sabri, Sekularisme, Politik

PENDAHULUAN

Sekularisme sebagai pandangan hidup yang mengusung pemisahan agama dan negara telah direspon oleh banyak pemikir Islam. Tokoh seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas, Yusuf Qaradhawi, Muhammad 'Imarah, Muhammad 'Ali al-Bar, dan Shalah al-Shawi telah mengajukan kritik yang tajam terhadap pemikiran tersebut.

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji pandangan kritis Mustafa Sabri terhadap sekularisme, khususnya dalam ranah politik. Mustafa Sabri merupakan *syaiikhul Islam* terakhir Turki Utsmani dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting yang memengaruhi kehidupan politik dan intelektual di Turki dan Mesir pada paruh pertama abad ke-20. Kritiknya terhadap sekularisme telah ditulis dalam beberapa buku dan halaman-halaman surat kabar. Di antaranya terdapat pada buku *Islam'da İmamet-i Kübra* yang ditulis sebagai bantahan terhadap pemikiran sekularisme Ali Abdul Razik dan buku *al-Nakir 'ala Munkiri al-Ni'mah min al-Din wa al-Khilafah wa al-Ummah* sebagai tindak lanjut atas sanggahannya terhadap tokoh tersebut. Juga pada karya Sabri yang monumental *Mauqifu al-Aqli wa al-'Ilmi wa al-'Alam min Rabbi al-'Alamin wa 'Ibadihi al-Mursalin*.

Sekularisme politik merupakan suatu pemikiran yang mendapatkan kritikan tajam dari Mustafa Sabri. Dalam sanggahannya, Sabri tidak hanya mengurai hakikat sekularisme, tetapi juga bahaya dan implikasi ideologi tersebut bagi masyarakat Islam. Penelitian ini akan mengurai kritikan-kritikan Mustafa Sabri terhadap sekularisme politik, dengan identifikasi terhadap bahaya, hakikat, dan konsekuensi dari pemisahan agama dan negara. Kajian ini memberikan gambaran lebih dalam tentang latar belakang, argumentasi, dan implikasi pemikiran Mustafa Sabri terhadap sekularisme. Ini akan menjadi sumber berharga bagi mereka yang ingin memahami perspektif Islam tentang sekularisme, khususnya dalam ranah politik.

Biografi Mustafa Sabri

Mustafa Sabri Al-Tauqadi, atau lengkapnya Mustafa Sabri Al-Tauqadi ibnu Ahmad ibnu Muhammad Al-Qozabadi, lahir dari keluarga dengan nasab terhormat di Tokat pada 12 Rabiul Awwal 1286 H atau 21 Juni 1869 M. Sebelum menginjak usia sepuluh tahun, Mustafa Sabri telah menghafal Al-Qur'an. Ia mendalami ilmu-ilmu keislaman seperti ulum Al-Qur'an, ilmu hadits, ilmu qira'at, ilmu aqidah, ilmu tafsir, ilmu fiqih, ushul fiqih, dan lain sebagainya dengan intensif di bawah bimbingan para ulama besar. Saat menginjak usia remaja, ia mendapat izin dari orang tuanya untuk pergi ke kota Kayseri guna menuntut ilmu kepada Syekh Muhammad Amin Ad-Duriki¹. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikannya di Istanbul di bawah bimbingan Syekh Ahmad 'Ashim Al-Kumiljanwi, wakil bidang pendidikan di Al-Masyikhah Al-Islamiyyah. Mustafa Sabri mengikuti ujian kelulusan bernama "ruus" pada tahun 1307 H/1890 M dan berhasil lulus dengan predikat tinggi².

Setelah menyelesaikan masa pendidikannya, Mustafa Sabri memulai karier keilmuannya sebagai pengajar di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih (1428 M - 1481 M). Di sinilah lahir ulama-ulama besar seperti Syekh Said Afandi, Syekh Kamil Mirats, dan Syekh Muhammad Sabri 'Abidin, yang mendapat didikan dari Mustafa Sabri. Ia juga menjadi pengajar di Jami Al-Atsariyyah Besiktas, Madrasah Al-Wa'izhin, Kuliah Ilahiyat di Dar Al-Funun, dan Madrasah Al-Mutakhosisin³. Pada tahun 1316 H/1898 M, Mustafa Sabri diangkat sebagai pengampu kuliah di hadapan Sultan Abdul Hamid II, yang disebut durus al-hudur. Karena kekaguman Sultan terhadapnya, ia kemudian diangkat sebagai pustakawan pribadi Sultan dari tahun 1900 hingga 1904 M⁴. Selanjutnya, Mustafa Sabri mencapai kedudukan keilmuan tertinggi di Kekhalifahan Utsmani sebagai syekh al-Islam⁵.

Mustafa Sabri adalah seorang penulis produktif yang telah menghasilkan 17 karya, enam di antaranya membahas tentang dasar-dasar agama dan menjawab syubhat yang muncul terhadap Islam pada zamannya baik dalam ranah akidah, syariah, akhlak, dan politik. Seperti buku "*Mauqiful Aqli wa al-Ilmi wa al-Alam mi Robbil Alamin wa Ibadihi al-Mursalin*", "*Mauqifu al-Basyar Tahta Sulthon al-Qadar*", "*Al-Qaulu al-Fashl Baina Alladzina Yu'minuna bi al-Ghoibi wa Alladzina La Yu'minuna*", "*Qauli fi al-Mar'ah wa Muqaranatuhu bi Aqwali Muqallidati al-Gharb*", "*Mas'alatu Tarjamati al-Qur'an*", dan "*An-Nakir 'ala Munkiriy an-Ni'mah min ad-Din wa al-Khilafah wa al-Ummah*"⁶.

Selain berfokus pada bidang keilmuan, Mustafa Sabri juga memiliki minat dalam bidang politik. Ia memulai karier politiknya dengan menjadi anggota parlemen

¹ Mehmet Kadri Karabela, *One of the Last Ottoman Şeyhülislâms, Mustafa Sabri Efendi (1869-1954): His Life, Works, and Intellectual Contributions* (Monteral: McGill University Libraries, 2003), 36.

² Mufarrih ibn Sulaiman al-Qusi, *Mustafa Sabri al-Mufakkir al-Islami wa al-'Alimu al-'Alami wa Syaikh al-Islam fi al-Daulah al-'Utsmaniah Sabiqan*, 1 ed. (Damaskus: Dar al-Qalam, 2006), 7981.

³ Ibid, 83-84.

⁴ Mufarrih ibn Sulaiman al-Qusi, *Al-Syekh Mustafa Sabri wa Mauqifuhu min al-Fikri al-Wafid*, 1 ed. (Riyadh: Markaz al-Malik Faishal li al-Buhuts wa al-Dirasat al-Islamiah, 1997), 69-70.

⁵ Ibid, 73-75.

⁶ *One of the Last Ottoman Şeyhülislâms, Mustafa Sabri Efendi (1869-1954): His Life, Works and Intellectual Contributions*, 57-60.

Utsmani mewakili daerahnya, Tokat, pada tahun 1908 M. Kemudian, ia dan sejumlah individu yang tidak sependapat dengan Partai *al-Ittihad wa al-Tarraqi* mendirikan partai baru bernama "*al-Hurriyah wa al-Itlaf*". Di dalam partai ini, Mustafa Sabri menduduki posisi penting sebagai wakil ketua partai dan dianggap sebagai juru bicara partai berkat kemampuan retorikanya yang kuat. Ia juga menjabat sebagai anggota majlis *al-a'yan at-utsmani*, wazir agung Utsmani menggantikan Damad Farid Pasha, dan pemimpin majelis permusyawaratan negara⁷. Setelah runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani, Mustafa Sabri memilih untuk berhijrah ke Mesir dan wafat di sana pada hari Jum'at, 7 Rajab 1373 H/12 Maret 1954 M⁸.

Pengertian Sekularisme

Sekularisme berasal dari bahasa latin "*saeculum*" yang mengandung dua makna, yaitu "*time*" (waktu) dan "*location*" (tempat). "*Time*" menunjukkan saat ini, sedangkan "*location*" dikaitkan kepada dunia⁹. Kosa kata bahasa latin lainnya yang memiliki kemiripan dengan *saeculum* adalah "*mundus*"¹⁰. Namun, keduanya memiliki nuansa makna yang dapat dibedakan. *Saeculum* lebih menekankan dimensi waktu, sementara *mundus* lebih terkait dengan dimensi ruang¹¹. Adapun *secularism* bermakna keterhubungan dengan dunia dan penafian terhadap nilai-nilai spiritual. Sementara *secularize* diartikan sebagai proses penduniaan atau tahapan yang mengarah kepada keadaan sekuler, yakni dari sakral menuju sekuler¹².

Dalam konteks bahasa Arab, *secularism* diterjemahkan menjadi *al-'ilmaniyyah*. Penerjemahan ini mendapat kritik dari Yusuf Qaradawi, menurutnya pemaknaan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak ada keterkaitan dengan kata ilmu¹³. Kritik yang sama juga dikemukakan oleh Safar Ibn Abdurrahman Al-Khuwaili, dan Ghalib ibn 'Ali 'Awajiy. Keduanya memandang bahwa penerjemahan yang tepat untuk kata *secularism* adalah *al-ladiniyyah* dan *al-dunyawiyyah*. Sebab kata ilmu jika diterjemah ke dalam bahasa Inggris menjadi *science* bukan *secularism*.¹⁴

Selanjutnya menurut Kamus Bahasa Indonesia, sekuler bermakna sesuatu yang bersifat duniawi atau kebendaan, yaitu bukan berlandaskan karakter keagamaan atau kerohanian. Sekularisme diartikan sebagai paham atau kepercayaan yang berpendirian bahwa agama tidak terlibat dalam urusan politik, negara, atau institusi publik. Sedangkan sekularisasi memiliki berbagai makna: (1) hal-hal yang membawa

⁷ Al-Syekh Mustafa Sabri wa Mauqifuhu min al-Fikri al-Wafid, 129.

⁸ Ibid, 129.

⁹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993), 16.

¹⁰ Muhammad Azhar, "Islam dan Sekulerisasi Politik," dalam *Jurnal Mukaddimah* 11 (2001): 133.

¹¹ Adnin Armas, "Menelusuri Gagasan Sekulerisasi Nurcholis Madjid," dalam *Jurnal Tsaqafah* 3, no. 2 (1428): 405-406.

¹² *The New International Webster's Comprehensive Dictionary of the English Language* (Chicago: Trident Press International, 1974), 1138.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Al-Islam Wal-'Ilmaniyyah, Wajhan Liwajhin* (Kairo: Dar-al-Shohwah Li al-nasyr Wa al-tauzi, 1996), 48.

¹⁴ Safar Ibn Abdurrahman Al-Khuwaili, *Al-'Ilmaniyyah Nasyatuha wa Tathawwuruha wa atsaruha fi al-Hayat al-Islamiyyah al-Mu'ashirah* (Mesir: Maktab Thayyib, 1998), 21.

ke arah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama dan (2) pengambilalihan bangunan atau barang milik negara dan digunakan untuk keperluan lain.¹⁵

Penjelasan lebih lanjut tentang pengertian sekularisme dipaparkan oleh Harvey Cox. Menurutnya, ada perbedaan antara sekularisme dengan sekularisasi. Sekularisme merupakan pandangan hidup baru yang tertutup dan berfungsi serupa agama.¹⁶ Pemikiran ini bertujuan untuk menjauhkan negara, pendidikan, akhlak, dan seluruh aspek kehidupan dari kontrol agama.¹⁷ Sementara sekularisasi merujuk pada pembebasan manusia dari pengaruh yang berkaitan dengan agama, maupun kontrol metafisik terhadap pemikiran dan bahasa manusia.¹⁸

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata sekuler, sekulerisasi, dan sekulerisme atau *ilmaniyyah* dalam bahasa Arab memiliki pengertian yang berbeda-beda. Akan tetapi, dari semua perbedaan itu memiliki titik persamaan, yaitu menyudutkan peran agama dalam kehidupan.

Sejarah Kemunculan Sekularisme

Sekularisme, yang lahir dari rahim peradaban Barat dan merupakan produk dunia Kristen,¹⁹ telah bermula di Eropa Barat semenjak dua setengah abad terakhir.²⁰ Hal itu bermula ketika kekeristenan menghadapi tekanan yang kuat, sehingga kekuasaan gereja dibatasi dan diperkecil. Otoritas politik yang pada abad pertengahan dikuasai oleh gereja kini mengalami transformasi menuju sekuler. Proses sekularisasi juga menysasar kepada metodologi keagamaan, sehingga berbagai pemikiran teologi liberal bermunculan di dunia Kristen. Dari sinilah, proses sekularisasi dan liberalisasi agama disebar dan dipromosikan ke agama-agama lainnya, termasuk Islam.²¹

Menurut Adian Husaini, ada beberapa alasan mengapa sekularisasi terjadi pada sejarah Barat.²² Pertama, terdapat trauma sejarah yang berasal dari dominasi Kristen pada periode abad pertengahan. Abad tersebut dinamakan sebagai "Zaman Kegelapan", karena merupakan fase kelam di Barat. Periode ini ditandai dengan kuatnya dominasi gereja terhadap masyarakat pasca runtuhnya Romawi Barat, hingga berakhir di zaman Renaissance. Gereja mengklaim dirinya sebagai wakil resmi Tuhan di dunia, dan terlibat dalam berbagai tindakan kejam yang tidak manusiawi²³. Hal itu diperparah dengan adanya inkuisisi yang sangat brutal²⁴ dan terpeliharanya konsep

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1287.

¹⁶ Adnin Armas, *Pengaruh Kristen Orientalis Terhadap Islam Liberal* (Jakarta: GIP, 2003), 8.

¹⁷ Muhammad Ali Al-Bar, *al-'Almaniyyah: Judzuruha wa Ushuluha* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008), 27.

¹⁸ Ibid, 17.

¹⁹ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 28.

²⁰ Syamsuddin Arif, *Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 86.

²¹ *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*, 28-29.

²² Adian Husaini, *Mengapa Barat Menjadi Sekuler-Liberal* (Ponorogo: CIOS ISID, 2007), 3.

²³ Ibid, 4-5.

²⁴ Frederiek Djara Wellem, *Kamus Sejarah Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 188.

infallibilitas²⁵, yang membuat gereja kebal kritik. Kedua, munculnya problematika terkait teks Bible. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menghadapi tantangan ontensitas, dan ketiadaan dokumen asli bersama dengan adanya berbagai versi yang berbeda-beda semakin menimbulkan keraguan akan keasliannya²⁶. Ketiga, adanya isu-isu teologi Kristen yang menjadi faktor pendorong terjadinya proses sekularisasi. Seperti penentuan aspek-aspek ketuhanan Yesus pada Konsili Nicea, syahadat Katolik, dan perdebatan lainnya setelah Konsili Kalsedon yang menyebabkan perpecahan gereja Timur dan Barat²⁷. Semua ini berkontribusi pada meningkatnya presepsi umum masyarakat Barat supaya diadakan sekularisasi.

Dalam perspektif Dr. Camile al-Hajj, sekularisme lahir sebagai respon atas konflik berkepanjangan antara gereja dan pemerintah di Eropa. Pemikiran ini bertujuan untuk melakukan pemisahan antara agama dan negara, juga antara doktrin gereja dan ilmu pengetahuan²⁸. Pemisahan terjadi karena sains sering kali bersebrangan dengan ajaran gereja, dan adanya pemaksaan terhadap para ilmuwan agar tunduk pada doktrin gereja yang problematis. Sehingga, beberapa ilmuwan terlibat konflik dengan gereja, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup karena pendapatnya²⁹. Sementara itu, Yusuf Qaradhawi merangkum beberapa faktor yang menjadi sebab munculnya sekularisme di Barat. Pertama, faktor agama, berhubungan dengan ajaran Bibel sendiri. Kedua, faktor pemikiran, meliputi pertentangan ajaran gereja dan perkembangan ilmu pengetahuan zaman itu. Ketiga, faktor psikologi, terkait trauma sejarah saat gereja berkuasa penuh, Barat mengalami kemunduran, pertentangan, dan stagnasi ilmu pengetahuan. Keempat, faktor sejarah, yaitu saat gereja mendominasi kehidupan di zaman pertengahan. Kelima, faktor realitas kehidupan empiris³⁰.

Jelaslah bahwa kemunculan sekularisme di dunia Barat merupakan akibat dari berbagai faktor, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setelah menghadapi dominasi gereja yang kuat, konsep agama yang problematis, perpecahan, dan fase kemandegan ilmu pengetahuan, Barat akhirnya merangkul sekularisasi sebagai langkah menuju kemajuan dan modernitas.

Kritik Mustafa Sabri terhadap Sekularisme Politik Bahaya Sekularisme

Mustafa Sabri memulai kritiknya terhadap sekularisme³¹ dengan menyingkap bahaya pemikiran tersebut³². Menurutnya, dalam berbagai penyimpangan yang diciptakan kaum modernis di negara-negara Islam, terdapat rencana jahat dan upaya

²⁵ Ibid, 246,

²⁶ *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*, 41-46.

²⁷ Ibid, 46-55.

²⁸ Dr. Camile Al-Hajj. *A Simplified Encyclopedia of philosophical and Sociological Thought*, (Beirut: Librairie du Liban Publishers, 2000), 373.

²⁹ *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*, 48.

³⁰ *Al-Islam Wal-'Ilmaniyah, Wajhan Liwajhin*, 53-59.

³¹ Dalam karya-karyanya, Mustafa Sabri sering menyebut sekularisme dengan (pemisahan agama dari politik) *fashlu al-din 'an al-siyasah*, tidak dengan istilah sekularisme.

³² *Al-Syekh Mustafa Sabri wa Mauqifuhu min al-Fikri al-Wafid*, 478.

untuk melepaskan diri dari agama. Akan tetapi, narasi mereka berupa pemisahan agama dan politik adalah lebih halus dan lebih parah dari misi yang lainnya, karena merupakan bentuk revolusi bernegara terhadap agama masyarakat, dan pemutusan kekuasaan dari hukum Islam. Pemerintah yang menerapkan sekularisme dianggap membelot terhadap agama, demikian juga suatu masyarakat apabila berdiam diri (tidak mengingkari kesalahan sekularisme). Bahkan sekularisme bisa berpotensi melahirkan kemurtadan individu, sebab menerima kekuasaan yang mendeklarasikan kemerdekaan dari hukum Islam, padahal sebelumnya tunduk pada syariah.³³

Dengan demikian, Sabri mengingatkan akan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama dalam struktur dan kebijakan pemerintahan, jangan umat Islam terjerumus ke dalam jurang sekularisme yang dapat mengancam keutuhan nilai-nilai agama.

Hakikat Sekularisme

Setelah itu, Mustafa Sabri menjelaskan berbagai hakikat sekularisme, yang menurutnya memiliki banyak makna. Pertama, sekularisme menandakan keluarnya pemerintahan kaum muslimin dari tali Islam, juga pemilihan penguasa yang bertentangan dengan Islam, yang kemudian menjadikan umat terlepas dari ikatan agama.³⁴ Kedua, sekularisme menggambarkan asumsi bahwa agama tidak memiliki otoritas dan pengontrolan terhadap pemerintah, sementara pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengontrol rakyat.³⁵ Ketiga, sekularisme menandakan deklarasi pembebasan suatu pemerintahan dari kewajiban untuk tunduk terhadap hukum Islam yang sebelumnya ditaati.³⁶ Keempat, penamaan konsep sekularisme dengan istilah *fashlu al-din 'an al-siyasah* (pemisahan agama dari politik) dilakukan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul ketika kalangan beragama mendengarnya. Padahal hakikat dari sekularisme adalah penghapusan agama dari negara, untuk kemudian melepaskan agama dari umat.³⁷ Kelima, sekularisme mencerminkan pemisahan agama dari kekuasaan, yang kemudian digantikan dengan akal manusia yang terbatas. Mustafa Sabri menegaskan bahwa sepanjang sejarah umat Islam tidak pernah terjadi penghapusan syariah dan penggantian posisinya dengan hukum asing. Bahkan di bawah penguasa fasik sekalipun, mereka tetap berhukum dengan hukum Islam.³⁸

Kemudian, Mustafa Sabri menganalogikan tidak terlaksananya syariah pada tingkat individu dengan absennya syariah pada tingkat negara. Menurutnya, sebagaimana seorang muslim tidak diperkenankan berlepas diri dari prinsip syariah, begitupun juga pemerintahan Islam tidak seharusnya menjalankan roda

³³ Mustafa Sabri, *Mauqifu al-Aqli wa al-'Ilmi wa al-'Alam min Rabbi al-'Alamin wa 'Ibadihi al-Mursalin*, 2 ed. (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1981), 4:281–282.

³⁴ Ibid, 1:162–163.

³⁵ Ibid, 4:291.

³⁶ Ibid, 4:292–293.

³⁷ Ibid, 4:291–292.

³⁸ Ibid, 4:292.

pemerintahannya tanpa dasar hukum Islam.³⁹ Jika suatu pemerintahan Islam melanggar batasan syariah tanpa mengklaim harusnya memisahkan agama dari negara, maka tindakan tersebut dihukumi fasik dan bukan murtad. Pelanggaran semacam itu hanya dari aspek pelaksanaan, bukan berlandaskan pemahaman dan keyakinan akan benarnya pemisahan agama dan negara, sehingga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 47. Namun, Mustafa Sabri mempertimbangkan situasi dimana pemerintahan Islam melanggar aturan agama dengan kepercayaan bahwa syariah hanya wajib untuk rakyat dan tidak berlaku untuk negara. Dalam konteks ini, pelanggaran tersebut berangkat dari pemahaman dan keyakinan sekularisme, sehingga pemerintahan tersebut dihukumi murtad. Prinsip yang sama berlaku bagi rakyat yang meridhai sikap negara tersebut, sesuai dengan Al-Maidah ayat 44. Sabri juga menyoroti tindakan negara-negara Islam yang meniru Barat dengan menunjukkan religiusitas hanya pada hari-hari perayaan dan pertemuan resmi. Menurutnya, praktik seperti itu tidak dapat dikategorikan sebagai karakteristik negara Islam sesungguhnya, melainkan menyerupai sikap munafik.⁴⁰ Mustafa Sabri memberikan analisis yang tajam terkait implementasi hukum-hukum Islam dalam konteks negara. Analisis tersebut dibangun berdasarkan klasifikasi individu dalam kategori Islam, kafir, dan munafik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Mustafa Sabri memandang hakikat sekularisme berpotensi menjadi ancaman serius terhadap integritas Islam dalam konteks pemerintahan. Analisis ini memberikan dasar pemikiran yang kuat untuk memahami implikasi sifatnya ketika memahami esensi sekularisme.

Konsekuensi Sekularisme

Untuk lebih menegaskan bahaya sekularisme, Mustafa Sabri menyatakan bahwa pemisahan agama dan politik lebih berdampak merugikan Islam dibanding agama lain, dikarenakan beberapa alasan. Pertama, Islam tidak terbatas pada ibadah saja, tetapi mencakup transaksi ekonomi, hukum pidana, dan segala sesuatu yang berada dalam kewenangan pengadilan, kementerian, dan dewan perwakilan rakyat. Islam adalah ibadah, syariah, implementasi, dan pertahanan. Semua konsepsi Islam terkait kenegaraan ini, dianggap suatu kelebihan Islam dibanding agama lain dan penghalang terkuat prinsip sekularisme. Kedua, Islam adalah agama, negara, dan kebangsaan bagi pemeluknya. Ia mengelilingi para penganutnya dari segala sisi,

³⁹ Menurut Mustafa Sabri, syarat keabsahan suatu negara disebut sebagai negara Islam adalah ketundukan pada hukum-hukum Islam, sebagaimana rakyatnya juga taat pada aturan agama. Masyarakat yang mempraktikkan ajaran Islam, tetapi negaranya tidak mematuhi aturan agama, tidak bisa kategorikan negara Islam. Oleh karena itu, ia membagi agama sebuah pemerintahan dalam dua kategori:

Pertama: masyarakat suatu negara berafiliasi dan tunduk pada agama tertentu berdasarkan pilihan mereka sepenuhnya, tidak didasarkan perintah atau larangan siapa pun yang mencapai tingkat otoritas.

Kedua: suatu pemerintahan yang patuh pada ketentuan syariah dan tunduk pada perintah Allah dan Rasul-Nya, begitu juga dengan masyarakatnya. Lihat: *Al-Syekh Mustafa Sabri wa Mauqifuhu min al-Fikri al-Wafid*, 486.

⁴⁰ *Mauqifu al-Aqli wa al-'Ilmi wa al-'Alam min Rabbi al-'Alamin wa 'Ibadihi al-Mursalin*, 1: 124-125.

menghilangkan segala perbedaan di antara mereka, dan memecah nasionalisme yang hanya berdasar bangsa. Di dalamnya terkandung kesatuan sosial yang dicari oleh setiap bangsa, juga persamaan hakiki berdasarkan ketakwaan. Ketiga, Islam memuat semua undang-undang yang dibutuhkan negara dan bangsa, independen, dan kualitasnya tidak sebanding dengan agama manapun. Semua hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga tercatat dalam ribuan buku fikih dan ushul fikih.⁴¹

Keempat, melakukan pemisahan antara agama dan politik serta mengecualikan peran agama dalam kebijakan publik dapat menyebabkan hilangnya moral dan degradasi nilai, karena sulit untuk mengklaim adanya alternatif yang lebih efektif dalam menjaga moral selain melalui agama. Oleh karena itu, kemajuan yang terjadi di negara-negara maju saat ini diwarnai dengan kemerosotan moral, bahkan tersebarnya amoralitas dianggap sebagai indikator kemajuan peradaban mereka.⁴² Kelima, politik sekuler mengharuskan agar agama berada di bawah otoritas negara dan melarangnya ikut campur dalam segala urusan pemerintahan. Menurut Sabri, penempatan agama di bawah negara bertentangan dengan prinsip *al-Islam ya'lu wa laa ya'lu alaih* (Islam selalu unggul dan tidak akan pernah diungguli). Sekalipun pemerintah menghormati agama dan tidak melakukan penganiayaan apapun, tetap saja otoritas politik berada di luar kendali agama. Situasi ini menyerupai pemerintahan Mesir pada masa protektorat Inggris, yang telah kehilangan martabatnya karena di bawah perlindungan dan kendali Inggris.⁴³ Keenam, pemisahan agama dari politik dianggap lebih merugikan dan berbahaya daripada memutuskan hubungan agama dengan umat. Hal ini dikarenakan kemampuan pemerintah untuk mempengaruhi umat, sementara umat memiliki keterbatasan dalam mempengaruhi pemerintah, karena tunduk pada kekuasaannya. Masyarakat tidak memiliki sarana yang memadai untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan kecuali melalui pemerintahan itu sendiri.⁴⁴

Ketujuh, asumsi bahwa pemerintahan sekuler bersikap netral terhadap keberagaman masyarakat dengan tidak memaksa dan melarang, tetapi menyerahkan pengamalan syariah kepada masyarakat sendiri justru akan melahirkan konsekuensi negatif. Hal ini akan memberi peluang kepada orang-orang yang tidak bermoral untuk menuruti hawa nafsunya, apalagi jika mereka memiliki relasi dengan pemerintah sekuler. Sehingga tersebarlah kerusakan dan kemaksiaatan, yang akan menyulitkan orang-orang religius untuk mempraktikkan prinsip-prinsip agama.⁴⁵ Kedelapan, memisahkan agama dari politik mengimplikasikan perlunya penghapusan pasal dalam konstitusi yang menetapkan bahwa agama resmi negara adalah Islam. Padahal, seharusnya agama dintegrasikan sebagai faktor yang mempengaruhi seluruh

⁴¹ Ibid, 4:295.

⁴² Ibid, 1:11.

⁴³ Ibid, 4:293.

⁴⁴ Ibid, 4:291.

⁴⁵ Ibid, 4:291.

urusan negara.⁴⁶ Kesembilan, kufurnya pemikiran sekularisme yang dianut pemerintah akan menular kepada masyarakat. Sebab pemerintah adalah wakil rakyat, dan apa yang dilakukan seorang wakil akan diikuti oleh pihak yang diwakilinya.⁴⁷

Secara keseluruhan, Mustafa Sabri menekankan bahwa dampak sekularisme menimbulkan risiko besar bagi Islam, baik hilangnya moralitas, kemerosotan nilai-nilai, penyebaran sekularisme di masyarakat, kurangnya netralitas pemerintah sekuler terhadap keberagaman masyarakat, hilangnya pengaruh agama dalam struktur negara, dan kemungkinan sekularisme diikuti oleh rakyat. Oleh karena itu, Sabri menekankan pentingnya menjaga syariat dalam bernegara.

Jika kita bandingkan, dua pemikir Islam yang kritis terhadap sekularisme, Mustafa Sabri dan Yusuf Qardawi, keduanya menawarkan perspektif unik tentang pemisahan agama dan negara. Analisis Mustafa Sabri menyoroti bahaya sekularisme, sifatnya, dan dampaknya terhadap Islam. Sebaliknya, Yusuf Qardawi mengkaji dan mengkritik asal usul sekularisme, dengan menekankan bahwa konsep tersebut tidak berakar pada tradisi Islam.⁴⁸ Menurut Sabri, bahaya sekularisme antara lain adanya kemungkinan masyarakat Islam meninggalkan agamanya bahkan kemungkinan adanya kemurtadan individu.⁴⁹ Ia menekankan bahwa penerapan sekularisme yang dilakukan pemerintah dapat dilihat sebagai pengkhianatan terhadap agama, karena pemerintah Islam sepanjang sejarah mematuhi hukum Syariah. Menurut Sabri, hakikat sekularisme adalah pemisahan kekuasaan agama dan negara, serta penggantian otoritas agama dengan akal manusia yang terbatas.⁵⁰

Berbeda dengan Barat, Yusuf Qardawi menyatakan bahwa dalam tradisi Islam tidak ada pemisahan antara agama dan dunia. Ia menolak pemisahan kekuasaan Allah dan kekuasaan dunia, menyamakannya dengan pikiran dan tubuh yang harus selalu satu. Qardawi juga menegaskan bahwa dalam tradisi Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik, ia mengutip Alquran dan mengatakan bahwa politik adalah bagian dari aktivitas nabi dan Khulafa al-Rashiddin. Kritik Yusuf Qardawi terhadap sekularisme Barat antara lain pemisahan kehidupan Tuhan dan kehidupan kaisar dalam tradisi Kristen. Pemisahan ini tidak ada dalam ajaran Islam, kata Qardawi, karena Islam mengakui bahwa agama memainkan peran penting dalam mengatur semua aspek kehidupan.⁵¹

Perbandingan kritik Mustafa Sabri dan Yusuf Qardawi terhadap sekularisme memberikan wawasan mendalam tentang perspektif Islam tentang pemisahan agama dan negara. Keduanya sepakat bahwa konsep sekularisme tidak sesuai dengan prinsip Islam dan dapat berdampak negatif terhadap identitas keagamaan dan kehidupan umat.

⁴⁶ Mustafa Sabri, *Al-Nakir 'Ala Munkiri al-Ni'mah min al-Din wa al-Khilafah wa al-Ummah* (Beirut: Al-Matba'ah al-'Abbasiyyah, 1342), 135.

⁴⁷ *Mauqifu al-Aqli wa al-'Ilmi wa al-'Alam min Rabbi al-'Alamin wa 'Ibadihi al-Mursalin*, 4:286.

⁴⁸ *Al-Islam Wal-'Ilmaniyah, Wajhan Liwajhin*, 69.

⁴⁹ *Mauqifu al-Aqli wa al-'Ilmi wa al-'Alam min Rabbi al-'Alamin wa 'Ibadihi al-Mursalin*, 4:281-282.

⁵⁰ *Ibid*, 4:292.

⁵¹ *Al-Islam Wal-'Ilmaniyah, Wajhan Liwajhin*, 69.

KESIMPULAN

Melihat pandangan kritis Mustafa Sabri terhadap sekularisme politik. Dapat diambil kesimpulan bahwa Sabri menekankan bahaya, sifat, dan konsekuensi dari pemisahan agama dan politik.

Ide-idenya mencakup analisis rinci tentang penerapan hukum Islam dalam konteks negara dan identifikasi ancaman yang mungkin timbul dari sekularisme. Pertama, Mustafa Sabri menegaskan bahwa sekularisme bukan hanya penyimpangan ideologi tetapi juga rencana jahat untuk melepaskan diri dari agama. Narasi pemisahan agama dan negara dipandang sebagai bentuk revolusi negara melawan pemisahan kekuasaan dari agama rakyat dan hukum Islam. Kedua, menurut Sabri, hakikat sekularisme meliputi pemilihan penguasa yang tidak islamis, deklarasi pengecualian pemerintah dari ketaatan pada syariat Islam, dan penggantian agama dengan akal manusia yang terbatas. Sabri menekankan bahwa sepanjang sejarah Islam, hukum Syariah tidak pernah dihapuskan, bahkan di bawah pemerintahan yang fasik sekalipun. Ketiga, menurut Sabri, dampak sekularisme membawa kerugian yang lebih besar bagi Islam dibandingkan agama lain. Islam tidak hanya mencakup aspek ibadah, tetapi juga transaksi ekonomi, hukum pidana, dan seluruh aspek kehidupan. Pemisahan agama dan politik dapat mengakibatkan hilangnya moralitas dan merosotnya nilai-nilai, sehingga melemahkan kohesi sosial yang diakui Islam.

Ringkasnya, kritik Mustafa Sabri terhadap sekularisme politik memberikan perspektif Islam yang kuat mengenai bahaya dan konsekuensi pemisahan gereja dan negara. Analisisnya yang tajam memberikan pemahaman lebih dalam mengenai perspektif Islam terhadap sekularisme di ranah politik. Pandangan Sabri karenanya dapat menjadi sumber inspirasi dan refleksi bagi mereka yang ingin memahami kompleksitas hubungan agama dan politik dalam konteks masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnin Armas, "Menelusuri Gagasan Sekulerisasi Nurcholis Madjid," dalam *Jurnal Tsaqafah* 3, no. 2 (1428): 405-406.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993, *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Al-Bar, Muhammad Ali. 2008, *al-'Almaniyyah: Judzuruha wa Ushuluha*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Hajj, Dr. Camile. 2000, *A Simplified Encyclopedia of philosophical and Sociological Thought*, Beirut: Librairie du Liban Publishers.
- Al-Khuwaily, Safar Ibn Abdurrahman. 1998, *Al-'Ilmaniyah Nasyatuha wa Tathawwuruha wa atsaruha fi al-Hayat al-Islamiyah al-Mu'ashirah*, Mesir: Maktab Thayyib.
- Al-Qusi, Mufarrih ibn Sulaiman. 1997, *Al-Syekh Mustafa Sabri wa Mauqifuhu min al-Fikri al-Wafid*, Riyadh: Markaz al-Malik Faishal li al-Buhuts wa al-Dirasat al-Islamiah.

- Al-Qusi, Mufarrih ibn Sulaiman. 2006, *Mustafa Sabri al-Mufakkir al-Islami wa al-'Alimu al-'Alami wa Syaikhu al-Islam fi al-Daulah al-'Utsmaniah Sabiqan*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- Arif, Syamsuddin. 2008, *Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani.
- Armas, Adnin. "Menelusuri Gagasan Sekulerisasi Nurcholis Madjid." *Jurnal Tsaqafah* 3, no. 2 (1428).
- Armas, Adnin. 2003, *Pengaruh Kristen Orientalis Terhadap Islam Liberal*, Jakarta: GIP.
- Azhar, Muhammad. "Islam dan Sekulerisasi Politik." *Jurnal Mukaddimah* 11 (2001).
- Husaini, Adian. 2005, *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*, Jakarta: Gema Insani.
- Husaini, Adian. 2007, *Mengapa Barat Menjadi Sekuler-Liberal*, Ponorogo: CIOS ISID.
- Karabela, Mehmet Kadri. 2003, *One of the Last Ottoman Şeyhülislâms, Mustafa Sabri Efendi (1869-1954): His Life, Works, and Intellectual Contributions*, Montreal: McGill University Libraries, 2003.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Qardhawi, Yusuf. 1996, *Al-Islam Wal-'Ilmaniyah, Wajhan Liwajhin*, Kairo: Dar-al-Shohwah Li al-nasyr Wa al-tauzi.
- Sabri, Mustafa. 1342, *Al-Nakir 'Ala Munkiri al-Ni'mah min al-Din wa al-Khilafah wa al-Ummah*, Beirut: Al-Matba'ah al-'Abbasiyyah.
- Sabri, Mustafa. 1981, *Mauqifu al-Aqli wa al-'Ilmi wa al-'Alam min Rabbi al-'Alamin wa 'Ibadihi al-Mursalin*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- The New International Webster's Compeherensive Dictionary of the English Languange, 1979, Chicago: Trident Press International.
- Kusuma, A. R. (2021). Problem Konsep Komunikasi Barat (Upaya Integrasi dan Islamisasi Ilmu Komunikasi). *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 5(2), 162. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i2.3622
- Kusuma, A. R. (2022a). Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah." *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i1.8456> .
- Hidayatullah, Rakhmad Agung, Fuad Mas'ud, Amir Reza Kusuma, dan Usmanul Hakim. "Membangun Islamic Human Resource Development (I-HRD) di Perguruan Tinggi Berlandaskan Worldview Ekonomi Islam" 9, no. 1 (2023): 973–86. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8492>.
- Jarman Arroisi, Amir Reza Kusuma. "Menelaah Problem Terapi Yoga Perspektif Ibnu Taimiyah." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2022): 90–99.

- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- Latief, Mohamad, Ahmad Rizqon, Amir Reza Kusuma, dan Syaikhul Kubro. "The Problem of Religious Freedom In the Practice of Amar Ma'ruf Nahi Munkar." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (30 Juni 2022): 95–110. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12274>
- A'la Maududi, A. (1977). *The Process of Islamic Revolution*. Islamic Publication.
- Muhammad H.F, & Niki P.S. (2018). Pengembangan Human Resources Information System (HRIS) untuk Optimalisasi Manajemen di Perguruan Tinggi., *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro*, Vol.02(No.02), 1–12.
- Muhammad Syifa'urrahman & Amir Reza Kusuma. (2022). قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 18(1), 153–188. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>
- O. McClurg, N. (2019). *Exploring workplace Spirituality in the Context of Work Teams*. Dissertation of Human Resource Development. University of Texas.
- Salah Bin Tahar Machouche,. (2014). *An Islamic View of Human Development: Special Reference to Abdul Rahman Ibn Khaldun*, *EJBM- Special Issue: Islamic Management and Business.*: Vol. Vol. 2.
- Sayyid Qutb. (1998). *Al-adalah wa ijtimaiyah fi Islam*. Darus Shuruq.
- Sayyid Qutb. (1990). *Khasais Tasawur Islami* . Darus Shuruq
- Sayyid Qutb. (1999). *Tafsir Fi Zilali Al-Quran* . Darus Shuruq
- Nihayah, Ulin et al. "Konsep Memaafkan dalam Psikologi Positif". *Indonesian Journal of Counseling and Development*. Vol. 3 No. 2 (2021), h. 108–19. <https://doi.org/10.32939/ijcd.v3i2.1031>.
- Noor, Juliansyah. *Mrtodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pramono, Slamet, dan Saifullah Saifullah. "Pandangan Hamka tentang Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Azhar". *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 13 No. 2 (2015), h. 145–58. tersedia pada <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/291> (2015).
- Qonitah Tsabitah Azmi, dan Shifa Salsabilah. "Regulasi Kecemasan Dengan Dzikir Dalam Sudut Pandang Psikologi Tasawuf". *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol. 2 No. 4 (2024), h. 121–28. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1434>.
- Rachmawati, Yeni. "Permasalahan Sosial Emosional Pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak". *Universitas Terbuka*. 2019 38.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Pendidikan, Universitas Brawijaya*. Vol. Vol. 5 (2009), h. 9.
- Rita Susanti et al. "Perasaan Terluka Membuat Marah". *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. Vol. 10 No. Desember (2014), h. 103–9.
- Rosdialena, dan Ernadwita. "Sabar sebagai Terapi Kesehatan Mental". *Kajian dan Pengembangan Umat*. Vol. 3 No. 1 (2019), h. 45. tersedia pada <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/ummatanwasathan/article/view/1914>

(2019).

Rosly, Noor Farhah. "Nafsu Lawwamah dalam novel Tautan Hati". *Jurnal Melayu*. Vol. 17 No. 1 (2018), h. 16-30.

Santoso, Agus. *Mengontrol Emosi Menjadi Seni (Ekhprasis Tulisan Emosi)* Vol. 1 2021.

Sarnoto, Ahmad Zain, dan Sri Tuti Rahmawati. "Kecerdasan Emosional Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Statement : Media Informasi Sosial dan Pendidikan*. Vol. 10

Wellem, Frederiek Djara. 2004, *Kamus Sejarah Gereja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.